



bkkbn
Jambi

JL. R. Moh. Nur Atmadibrata, No. 19,
Telanai Pura, Buluran Kenali,
Kec. Telanaipura, Kota Jambi,
Jambi 36124

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS) PROVINSI JAMBI



**SEMESTER I
TAHUN 2024**

 www.jambi.bkkbn.go.id

 prov.jambi@bkkbn.go.id

 0741-60845

 0741-60443

**LAPORAN HASIL
MONITORING DAN EVALUASI**

**TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)
PROVINSI JAMBI**

**SEMESTER I (SATU)
TAHUN 2024**

Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi

JL. R. Moh. Nur Atmadibrata, No. 19,
Telanai Pura, Buluran Kenali, Kec. Telanaipura,
Kota Jambi, Jambi 36124

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Percepatan Penurunan Stunting sebagai upaya untuk mengatasi penyebab intervensi spesifik dan intervensi sensitif terjadinya stunting, yang dilakukan secara terpadu dan bersama-sama melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, sampai desa. Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting mendorong terbentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting. Tim ini dibentuk untuk berkomitmen dalam strategi Penurunan Percepatan Stunting berupa menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan keluarga, menjamin penuh asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan akses air minum dan sanitas sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 72 Tahun 2021. Keberhasilan dari Strategi Percepatan Penurunan stunting diharapkan mampu mencapai target pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi, Telah berhasil dalam menyusun Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jambi Semester I Tahun 2024. Dengan diterbitkannya laporan ini, kegiatan monitoring dan evaluasi Semester 1 telah di selesai secara keseluruhan TPPS Provinsi, 11 Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan yang ada di Provinsi Jambi. Laporan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dari setiap tim sehingga target percepatan penurunan stunting di tahun 2024 dapat tercapai.

Kami mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya pada semua pihak yang telah melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi ini, semoga kiprah kita selalu mendapatkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa dan akan mendapatkan hasil yang dicita-citakan.

Jambi, Agustus 2024
Ketua Pokja Hubalila


Islahiyah, S.Pd., MA.

SAMBUTAN

Dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi diantara pemangku kepentingan. Berdasarkan peraturan tersebut, BKKBN telah ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting.

Dalam rangka mendukung BKKBN untuk melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting, maka diperlukan adanya koordinasi dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari mulai tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Desa/Kelurahan, selain itu BKKBN juga menyusun Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) yang diantaranya adalah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang bertugas memberikan pendampingan kepada keluarga beresiko stunting, mulai dari Calon Pengantin sampai dengan anak berusia 0 – 59 bulan.

Dengan adanya TPPS, TPK dan Satgas Stunting diharapkan dapat membantu BKKBN dalam mencapai target Penurunan Stunting di Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Dalam pelaksanaan tugasnya tentu saja BKKBN perlu monitoring dan evaluasi terhadap tiga komponen ini merupakan hal yang tidak terpisahkan pada alur penurunan stunting. Dimana dalam pelaksanaan tugasnya, seluruh aspek yang telah terbentuk perlu terus mendapatkan dukungan dan koreksi sehingga terus berada dalam jalur yang sesuai dalam rangka pencapaian target penurunan stunting di bawah 12% pada tahun 2024 di Provinsi Jambi.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi
Jambi, Agustus 2023



Drs. Putut Riyatno M.Kes.

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
SAMBUTAN	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR LAMPIRAN	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Tujuan.....	8
1.3 Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan.....	9
1.4 Sasaran yang Terlibat.....	11
1.5 Metode Pelaksanaan	11
BAB II TEMUAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI	12
2.1 Monitoring dan Evaluasi TPPS Provinsi	12
2.1.1 Profil Temuan.....	12
2.1.2 Kesimpulan	16
2.1.3 Rekomendasi.....	17
2.2 Monitoring dan Evaluasi TPPS Kabupaten/Kota	19
2.2.1 Profil Temuan.....	19
2.2.2 Kesimpulan	25
2.2.3 Rekomendasi.....	25
2.3 Monitoring dan Evaluasi TPPS Kecamatan	28
2.3.1 Profil Temuan.....	28
2.3.2 Kesimpulan	31
2.3.3 Rekomendasi.....	32
2.4 Monitoring dan Evaluasi TPPS Desa/Kelurahan	34
2.4.1 Profil Temuan.....	34
2.4.2 Kesimpulan	42
2.4.3 Rekomendasi.....	43
BAB III. PENUTUP	47
LAMPIRAN	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi TPPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Semester I Tahun 2024	9
Tabel 2.	Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi TPPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Semester I Tahun 2024	9
Tabel 3.	Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi TPPS Kecamatan se-Provinsi Jambi Semester I Tahun 2024.....	9
Tabel 4.	Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi TPPS Desa/Kelurahan se-Provinsi Jambi Semester I Tahun 2024.....	10
Tabel 5	Inovasi yang dilakukan pada Kecamatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	30
Tabel 6.	Karakteristik Responden Monev TPPS Desa/Kelurahan	34
Tabel 7.	Gambaran Legal Apek TPPS Desa/Kelurahan	35
Tabel 8.	Gambaran pelaksanaan Rembuk Stunting dan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran TPPS Desa/Kelurahan	36
Tabel 9.	Gambaran Pelaksanaan Kegiatan Program Prioritas Pendampingan Keluarga oleh TPK bersama Mitra.....	37
Tabel 10.	Gambaran Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Percepatan Penurunan Stunting di TPPS Desa/Kelurahan	38
Tabel 11.	Gambaran Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa/Kelurahan	39
Tabel 12.	Gambaran Inovasi Percepatan Penurunan Stunting di Tim Percepatan Penurunan Desa /kelurahan	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten/kota.....	48
Lampiran 2. Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan.....	52
Lampiran 3. Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kelurahan/Desa	54
Lampiran 4. Instrumen Monitoring dan Evaluasi TPPS Provinsi	57
Lampiran 5. Instrumen Monitoring dan Evaluasi TPPS Kabupaten/Kota	59
Lampiran 6. Instrumen Monitoring dan Evaluasi TPPS Kecamatan	62
Lampiran 7. Instrumen Monitoring dan Evaluasi TPPS Desa/Kelurahan	64

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah terus berupaya melakukan percepatan penurunan stunting dengan target yang harus dicapai sebesar 14% di tahun 2024. Berdasarkan hasil SSGI tahun 2022, angka stunting di Indonesia sudah mengalami penurunan menjadi 21,6% dari 24,4% pada tahun 2021. Provinsi Jambi juga berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 4,4% pada Tahun 2022 sehingga menjadi 18,0%. Berdasarkan hal ini, Provinsi Jambi termasuk dalam 7 Provinsi dengan angka prevalensi terendah di Indonesia.

Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 telah mengarahkan semua pihak untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting secara konvergen dan terintegrasi. Dalam rangka koordinasi percepatan penurunan stunting maka dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari mulai tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

Melalui Peraturan Presiden 72 Tahun 2021 juga, Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana dalam upaya percepatan penurunan stunting. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai ketua pelaksana, Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) menyusun Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) yang diantaranya adalah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) juga membentuk (Tim Pendamping Keluarga) TPK dan Satgas stunting yang merupakan orang-orang independen non pemerintah untuk membantu melengkapi pelaksanaan percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sampai dengan tahun 2022, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Provinsi, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kabupaten/Kota. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kecamatan,

dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Desa/Kelurahan sudah terbentuk 100% di Provinsi Jambi. Selanjutnya, jumlah Tim Pendamping Keluarga (TPK) saat ini sudah terbentuk 2.573 tim yang berjumlah 7.719 petugas (2.573 Bidan/Tenaga Kesehatan, 2.573 Kader PKK, 2.573 Kader KB).

Pembentukan tim sesuai dengan peranannya sebagai cara untuk mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif dan efisien sehingga target percepatan penurunan stunting di tahun 2024 dapat tercapai. Pelaksanaan Monitoring (Pemantauan) dan evaluasi (Monev) yang dilakukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi sebagai bentuk manajemen pengelolaan tim yang merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi tentang proses dan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan, serta mengidentifikasi kendala-kendala dan intervensi yang diperlukan dalam upaya perbaikan pelaksanaan di waktu yang akan datang. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih objektif tentang kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan serta menilai hasil pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal di atas maka dilaksanakan monitoring dan evaluasi kepada TPPS Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan se-Provinsi Jambi, sehingga diketahui gambaran kondisi lapangan di setiap daerah dan wilayah, serta ditindaklanjuti dengan kebijakan dan kegiatan yang sesuai.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah untuk melihat sejauh mana pelaksanaan peran dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan se-Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mengetahui informasi terkait kondisi dan kendala dilapangan dalam pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi terhadap temuan/hasil yang didapatkan setiap tingkatan wilayah.

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024

1.3 Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan

Lokasi dan jadwal pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di tingkatan wilayah masing-masing. Adapun rincian lokasi dan jadwal pelaksanaan sebagai berikut.

Tabel 1. Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi TPPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Semester I Tahun 2024

No	Bidang	Jadwal	Instansi
1.	Konvergensi	5 Agustus 2024	BAPPEDA
2.	Intervensi Spesifik dan Sensitive		DINKES
3.	Koordinasi		BKKBN
4.	Perilaku Perubahan		DP3AP2

Tabel 2. Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi TPPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Semester I Tahun 2024

NO.	KABUPATEN/KOTA	JADWAL PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN
1.	Sarolangun	6 Juni 2024	Aula PP KB
2.	Batang Hari	19 Juni 2024	Aula BAPRIDA
3.	Muaro Jambi	20 Juni 2024	Ruang Aula PP KB
4.	Kota Jambi	24 Juni 2024	Aula PP KB
3.	Tanjung Jabung Timur	3 Juli 2024	Ruang Kadis PP KB
4.	Tanjung Jabung Barat	4 Juni 2024	Aula PP KB
5.	Tebo	9 Juli 2024	Raung Rapat PP KB
6.	Bungo	10 Juli 2024	Ruang Kadis PP KB
7.	Merangin	11 Juli 2024	Ruang Kadis PP KB
10.	Kerinci	1 Agustus 2024	Aula Dinas PPKB
11.	Kota Sungai Penuh	2 Agustus 2024	Aula Dinas PPKB
12.	Provinsi Jambi	5 Agustus 2024	Sekretariat Satgas Stunting Provinsi

Tabel 3. Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi TPPS Kecamatan se-Provinsi Jambi Semester I Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jadwal Pelaksanaan	Ketua Tpps Kecamatan
1.	Sarolangun	-	-
2.	Pemayang dan Muara Bulian	19 Juni 2024	Camat Pemayang dan Muara Bulian
3.	Sekernan dan Maro Sebapo	20 Juni 2024	Camat Sekernan dan Maro. Sebapo
4.	Kota Baru dan Jelutung	24 Juni 2024	Camat Kota Baru dan Jelutung
3.	Geragai dan Sabak Barat	3 Juli 2024	Camat Geragai dan Sabak Barat
4.	Tungkal Ilir dan Betara	4 Juni 2024	Camat tunggal ilir dan Betara

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Jadwal Pelaksanaan	Ketua Tpps Kecamatan
5.	Tebo ulu dan Sekcam Rimbo ilir	9 Juli 2024	Camat Tebo ulu dan Sekcam Rimbo ilir
6.	Pasar Ma. Bungo dan Rimbo Tengah	10 Juli 2024	Camat Pasar Ma. Bungo dan Rimbo Tengah
7.	Batang Masumai dan Nalo Tantan	11 Juli 2024	Camat Batang Masumai dan Nalo Tantan
10.	Air Hangat dan Air Hangat Barat	1 Agustus 2024	Camat Air Hangat dan Air Hangat Barat
11.	Pondok tinggi dan Pesisir Bukit	2 Agustus 2024	Camat Pondok tinggi dan Pesisir bukit

Tabel 4. Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi TPPS Desa/Kelurahan se-Provinsi Jambi Semester I Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Desa/Kelurahan	Jadwal Pelaksanaan	Lokasi Monev
Kerinci	Muara Semerah	01 Agustus 2024	Balai Penyuluh KB Kec. Air Hangat
	Muara Semerah Mudik		
	Koto		
Merangin	Nibung	11 Juli 2024	Balai Penyuluh KB Kec. Batang Masumai
	Pelangki		
Batanghari	Sungai Buluh	19 Juni 2024	Balai Penyuluh KB Kec. Muara Bulian
	Sungai Baung		
	Olak		
Tebo	Bedaro Rampak	08 Juli 2024	Aula Kantor Kecamatan Tebo Tengah
	Tengah Ulu		
	Sungai Alai		
Bungo	Kelurahan Bungo Barat	09 Juli 2024	Balai Penyuluh KB Kec. Pasar Muaro Bungo
	Kelurahan Batang Bungo		
	Kelurahan Jaya Setia		
Tanjung Jabung Barat	Sungai Nibung	04 Juli 2024	Balai Penyuluh KB Kec. Tungkai Ilir
	Tungkai III		
	Sriwijaya		
Sarolangun	-	-	-
Tanjung Jabung Timur	Rano	03 Juli 2024	Aula DPPKB Kabupaten Tanjung Jabung Timur
	Nibung Putih		
Kota Jambi	Wijaya Pura	20 Juni 2024	Balai Penyuluh KB Kec. Jambi Selatan
	The Hok		
	Pasir Putih		
Kota Sungai Penuh	Koto Renah	02 Agustus 2024	Balai Penyuluh KB Kec. Pesisir Bukit
	Koto Keras		
	Koto Dua		

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024

Kabupaten/Kota	Desa/Kelurahan	Jadwal Pelaksanaan	Lokasi Monev
Muaro Jambi	Pematang Pulai	20 Juni 2024	Aula Dinas PPKB Kab. Muaro Jambi
	Rantau Majo		
	Gerunggung		

1.4 Sasaran yang Terlibat

Sasaran yang terlibat pada kegiatan ini adalah Tim Monitoring dan Evaluasi dan peserta kegiatan monitoring dan evaluasi. Tim monitoring dan evaluasi terdiri dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi (Tim Kerja 4 BALNAK dan Tim Kerja 9 HUBALILA) dan Tim Satgas Stunting Provinsi Jambi (Koordinator Program Manager, Program Manager Bidang Program dan Kegiatan, Program Manager Bidang Data dan Monev). Peserta kegiatan monitoring evaluasi adalah TPPS Provinsi (Koordinator 4 Bidang TPPS Provinsi Jambi), TPPS Kabupaten/Kota (Sekretaris dan Koordinator 4 Bidang TPPS Kabupaten/Kota), Ketua TPPS Kecamatan, Ketua TPPS Desa/Kelurahan.

1.5 Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam bentuk *Forum Group Discussion* (FGD) dengan menggunakan instrument monitoring dan evaluasi yang telah ditetapkan Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Republik Indonesia (sebagaimana terlampir).

BAB II

TEMUAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

2.1 Monitoring dan Evaluasi TPPS Provinsi Jambi

2.1.1 Profil Temuan

Berdasarkan hasil Forum Group Discussion (FGD) yang dilakukan kepada anggota pengurus Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi dengan menggunakan instrumen formular monitoring dan evaluasi, didapatkan informasi sebagai berikut.

a. Legal Aspek

Struktur kelembagaan TPPS Provinsi masih sama dengan tahun 2023, yaitu menambahkan unsur Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jambi. selain itu ada penambahan dari unsur Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Asisten Provinsi yang membawahi Kepala Seksi Kesejahteraan (KESRA).

Pedoman atau juknis Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi masih dalam bentuk draft yang mengacu kepada indikator Perpres 72/2021 dan Perban 12/2021. Kebijakan terkait stunting dan ISPS tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 1607/SE/SETDA. Selanjutnya terdapat KESRA-3.1/VI/2024 tentang dukungan pelaksanaan kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting (ISPS) di Provinsi Jambi tanggal 21 Juni 2024.

b. Perencanaan dan Pengaangaran

Proses perencanaan dimulai dengan OPD membuat usulan sesuai target Rencana Strategi (RENSTRA) lima tahunan, selanjutnya menyesuaikan dengan pagu yang diberikan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) 2021-2026.

Program Percepatan Penurunan Stunting sudah tercantum dalam dokumen perencanaan daerah, dimana tahun 2024 Prevalensi Stunting ditargetkan turun menjadi 12%, selanjutnya 10% tahun 2025 dan 8,0% tahun 2026. Menyesuaikan dengan hasil SKI 2023 sebesar 13,5%.

Penganggaran Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) meningkat dari tahun 2023 ke tahun 2024, yaitu sebesar Rp. 63.660.836.248 rupiah menjadi Rp. 73.177.723.626. dengan penanggungjawab ada di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi. Sedangkan anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya anggaran yang digunakan dalam Percepatan Penurunan Stunting (Kabupaten/Kota) mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp. 49.183.213.000 menjadi sebesar Rp. 50.369.481.000 pada tahun 2024, kenaikan yang terjadi sebesar Rp. 1.186.268.000. Namun, kegiatan Tim Percepatan Penurunan Stunting belum terpisah secara rinci peruntukannya dalam kegiatan pelayanan spesifik, sensitif dan koordinatif.

Selain anggaran tersebut, ada pertemuan lintas sektor untuk perencanaan anggaran Percepatan Penurunan Stunting melalui mekanisme pendampingan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi yang pertemuannya dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi.

c. Implementasi

Adanya kegiatan rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat Provinsi yang sudah dilaksanakan 3 kali pada bulan Februari, April dan Juni 2024. Rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Forum pertemuan tagging anggaran stunting di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi pada 13 Juni 2024 sebagai tindak lanjut untuk hasil tagging

stunting, dilanjutkan pembahasan rinci kegiatan stunting di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi.

Selain itu, terdapat peran swasta untuk stunting dengan memberikan advokasi serta melalui media terkait Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting. Sedangkan dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta melalui kerja sama atau MOU dengan BKKBN Provinsi Jambi.

d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Kondisi angka stunting hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 sebesar 13,5% turun dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 pada angka 18,0 %, serta menjadikan Provinsi Jambi menduduki Prevalensi Stunting terendah ke-2 di Indonesia setelah Provinsi Bali 7,2%. Berdasarkan hasil e-PPGBM bulan Februari 2024 dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi jumlah angka stunting sebanyak 5.746 balita stunting bulan Februari 2024. Kondisi ini mengalami penurunan dari bulan Agustus 2023 sebanyak 7.290 balita stunting dengan kisaran penurunan jumlah balita stunting sebanyak 1.544 balita atau 21,18%. Penyusunan laporan semester data difasilitasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta difinalisasi dan upload oleh Tim dari Satgas stunting baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

e. Peran Pemangku kepentingan

Peran pemangku kepentingan di Provinsi cukup aktif dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan dari Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif, Bidang Perubahan Perilaku, Bidang Konvergensi serta Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi. Begitu pula dengan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) Provinsi sebagai unsur Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), dan mendapatkan penganugerahan Manggala Karya Kencana (MKK) bersama Gubernur Jambi atas jasanya menurunkan prevalensi stunting Provinsi Jambi menjadi urutan ke- 2 Nasional sebesar 13,5%. Peranan Satgas sangat membantu terutama mendukung Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Provinsi dalam membantu

Ketua dan menjalankan fungsi dalam upaya percepatan penurunan stunting, khususnya di Provinsi Jambi.

f. Pencapaian Indikator Perpres 72/21 dan RAN PASTI

Indikator Peraturan Presiden (PERPRES) dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) yang sulit dan belum mencapai target yaitu; Kabupaten Kerinci dan Merangin yang belum mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting.

Indikator pelayanan spesifik pada Perpres 72/21 diantaranya yaitu indikator persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah, persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan (70%): 61,82 (Data 2023), persentase kehamilan yang tidak diinginkan (15,5%): 8,24% (Data 2023), cakupan Calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah (90%): 33,67% (ELSIMIL JUNI 2024), cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan (90%): 46,33 (Hasil verval KRS 2024).

g. Permasalahan dan Kendala

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan didapatkan beberapa permasalahan sebagai berikut.

- 1) Pendanaan monitoring dan evaluasi serta koordinasi kegiatan yang terbatas.
- 2) Kesibukan dari masing-masing anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting.
- 3) Tidak tersedianya anggaran khusus untuk Tim Percepatan Penurunan Stunting.

h. Harapan

Beberapa harapan yang dapat diusulkan didalam kegiatan monev ini adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kegiatan rapat koordinasi TPPS di tingkat Provinsi yang terjadwal dengan baik dan rutin dengan pembahasannya yang mencakup kegiatan semua bidang
- 2) Tindak lanjut untuk hasil tagging stunting, dilanjutkan pembahasan rinci kegiatan stunting di masing-masing OPD dan instansi.
- 3) Ada pertemuan lintas sektor untuk perencanaan anggaran PPS melalui mekanisme pendampingan penyusunan APBD Provinsi melalui mekanisme pertemuan di Bappeda Provinsi adanya Pedoman /juknis PPS tingkat Provinsi mengacu kepada indikator Perpres 72/2021 dan Peraturan BKKBN RI 12/202.

2.1.2 Kesimpulan

Berdasarkan temuan hasil monitoring dan evaluasi semester 1 tahun 2024 ini, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Peran swasta untuk mendukung kegiatan stunting sangat diperlukan dengan memberikan advokasi serta melalui media terkait bapak/bunda asuh anak stunting.
- b. Sedangkan dengan perguruan tinggi negeri dan swasta melalui kerja sama atau MOU dengan BKKBN Provinsi Jambi.
- c. Dukungan dan peran pemangku kepentingan di Provinsi cukup baik termasuk dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan dari Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif, Bidang Perubahan Perilaku, Bidang Konvergensi dan Bidang Data monitoring dan evaluasi serta Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (TP PKK Provinsi).
- d. Peranan Satgas sangat membantu terutama mendukung sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Provinsi dalam membantu Ketua dan Sekretaris TPPS dalam menjalankan fungsinya dalam upaya percepatan penurunan stunting, khususnya di Provinsi Jambi.

- e. Terdapat indikator yang belum bisa dicapai termasuk beberapa Indikator Perpres 72 dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI). Daerah yang belum mencapai Indikator karena sulit yaitu; kabupaten Kerinci dan Merangin karena belum mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting. Indikator yang termasuk dalam pelayanan spesifik pada Perpres 72, yaitu indikator persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan (70%): 61,82 (Data 2023). Persentase kehamilan yang tidak diinginkan (15,5%): 8,24% (Data 2023). Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah (90%): 33,67% (ELSIMIL JUNI 2024), serta Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan (90%): 46,33 (Hasil verval KRS 2024).

2.1.3 Rekomendasi

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan dari Hasil monev ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Keterlibatan Sektor Swasta:

Mengingat pentingnya peran swasta dalam mendukung kegiatan penurunan stunting, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan advokasi dan kerjasama melalui media yang ada, khususnya dalam program bapak/bunda asuh anak stunting. Pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan insentif atau penghargaan yang mendorong lebih banyak keterlibatan sektor swasta dalam mendukung upaya penurunan stunting.

- b. Memperkuat Kerjasama dengan Perguruan Tinggi:

Kerjasama atau MoU antara perguruan tinggi negeri dan swasta dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi harus diperluas dan ditingkatkan. Kolaborasi ini dapat difokuskan pada penelitian, pengembangan strategi, dan pelatihan yang mendukung

program-program percepatan penurunan stunting. Perguruan tinggi dapat berperan sebagai pusat pengetahuan dan inovasi, serta menjadi mitra penting dalam pelaksanaan intervensi berbasis bukti.

c. Peningkatan Dukungan Pemangku Kepentingan:

Meski dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan lain sudah cukup baik, perlu adanya penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Pengembangan forum komunikasi rutin antara OPD, empat bidang pengurusan TPPS, serta TP PKK Provinsi perlu ditingkatkan untuk memastikan keselarasan dan efektivitas program.

d. Optimalisasi Peran Satgas:

Peranan Satgas yang sudah membantu sekretariat TPPS perlu dioptimalkan lebih lanjut. Penguatan kapasitas Satgas melalui pelatihan dan peningkatan sumber daya akan mendukung sekretariat TPPS dalam menjalankan fungsinya dengan lebih efektif. Keberlanjutan satgas stunting juga diharapkan dapat berjalan guna mendukung percepatan penurunan stunting.

e. Peningkatan Fasilitasi Daerah Pencapaian Indikator:

Kabupaten Kerinci dan Merangin perlu mendapatkan fasilitasi yang lebih baik sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam upaya penurunan stunting. Pemerintah provinsi dan TPPS harus mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi daerah-daerah ini, kemudian merumuskan strategi khusus yang dapat membantu pencapaian indikator yang sulit tercapai.

f. Peningkatan Cakupan Pelayanan Spesifik dan Sensitif:

Untuk mencapai indikator Perpres 72/21 dan RAN PASTI, perlu ada peningkatan pada beberapa aspek pelayanan, seperti konsumsi tablet tambah darah oleh remaja putri, pelayanan KB pasca persalinan, pemeriksaan kesehatan calon Pasangan Usia Subur (PUS), dan pendampingan keluarga berisiko stunting. TPPS bersama pemerintah

perlu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program-program tersebut.

2.2 Monitoring dan Evaluasi TPPS Kabupaten/kota

2.2.1 Profil Temuan

Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan kepada anggota pengurus Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota dengan menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi, didapatkan informasi sebagai berikut.

a. Legal Aspek

Secara legal aspek Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) telah terbentuk di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sejak Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Secara struktur semua Kabupaten/Kota telah sesuai dengan ketentuan di Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI). Secara pengorganisasian kinerja, hanya 2 Kabupaten/Kota yang telah memiliki program kerja Tim Percepatan Penurunan stunting (TPPS) Kabupaten/Kota, sisanya melaksanakan kinerja yang ada di sektor OPD masing-masing. TPPS Kabupaten/Kota secara berkala telah ditetapkan rapat koordinasi dan pertemuan lintas sektor terkait dengan percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten/Kota.

b. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran terkait dengan percepatan penurunan stunting telah berjalan di 11 Kabupaten/Kota hal ini didukung dengan adanya juknis pelaksanaan 8 aksi konvergensi Kabupaten/Kota pada aksi ke-2 perencanaan kegiatan diharapkan kabupaten/kota dapat melakukan perencanaan dan pemetaan serta adanya dukungan anggaran terkait percepatan penurunan stunting baik dari Anggaran Pendapatan Belanja negara Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Kabupaten/Kota, ataupun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun berjalan

dan tahun rencana yang dijalankan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Peruntukan anggaran percepatan penurunan stunting secara spesifik masih cukup rendah, akan tetapi kabupaten/kota memaksimalkan anggaran kegiatan rutin agar dapat dioptimalkan dalam percepatan penurunan stunting.

Anggaran percepatan penurunan stunting juga dioptimalkan dari tingkat desa melalui dana desa diharapkan dapat membantu percepatan penurunan stunting. Beberapa kabupaten/kota melakukan pendampingan secara khusus dalam perencanaan dan penganggaran desa untuk percepatan penurunan stunting melalui kegiatan monitoring dan evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kecamatan ke Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa. Akan tetapi, pada tingkat kecamatan belum tersedia anggaran percepatan penurunan stunting.

Adanya anggaran monitoring dan evaluasi di Kabupaten Merangin pada tahun 2024 sebagai contoh bagian dari Advokasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Merangin ke Pemerintah Daerah setempat yang berhasil mencapaikan pendanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten ke Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 200 Juta.

c. Implementasi

Implementasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten/Kota melalui 7 menu Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) telah dilaksanakan diantaranya Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Stunting, operasional Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSAT), Audit Kasus Stunting (AKS), operasional penampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK), operasional pencatatan hasil pemantauan dan pendampingan Tim Pendamping Keluarga, operasional koordinasi tingkat Kabupaten/Kota, operasional Miniloka karya. Akan tetapi terdapat beberapa kendala dalam implementasi dimana masih banyak

kabupaten/kota yang belum melaksanakan kegiatan diluar jadwal yang ditetapkan, misalnya hanya 2 dari 11 kabupaten/kota yang melaksanakan Audit Kasus Stunting Semester I di bulan Juni (Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi). sedangkan Minilokakarya telah berjalan sesuai dengan siklus yang telah ditetapkan hingga Juni. Semua kabupaten kota telah melaksanakan 4 kali kegiatan Miniloka karya, hal ini dipicu karena telah adanya surat yang dikeluarkan dari Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional Provinsi Jambi pada bulan Februari, untuk mendorong Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang dilaksanakan sesuai dengan siklus yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dari surat tersebut pada bulan Maret, Minilokakarya dilaksanakan secara serentak dengan Lokus stunting di Kabupaten Tebo dan Batanghari.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota sebagian besar masih bergerak di sektor masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini disebabkan hanya 4 Kabupaten/Kota yang memiliki program kerja perbidang masing-masing Tim Percepatan Penurunan Stunting. Akan tetapi, dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan tetap dilakukan baik secara langsung pada rapat koordinasi atau pun melalui Whatsapp *Group*. Koordinasi yang dilakukan di whatsapp grup provinsi cukup aktif didalam menggerakkan kegiatan-kegiatan untuk setiap Kabupaten/Kota, ada Tim teknis dari masing-masing OPD yang dibentuk untuk membantu percepatan kegiatan dari Tim Percepatan Penurunan Stunting kabupaten tersebut.

Dalam mendukung percepatan penurunan stunting seluruh Kabupaten/Kota telah melibatkan lintas sektor diantaranya partisipasi langsung dari dunia usaha melalui Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS), publikasi dari berbagai media, kerjasama dengan swasta, serta kerjasama pada perguruan tinggi dalam rangka percepatan penurunan stunting.

d. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

11 Kabupaten/Kota telah menetapkan desa/lokus percepatan penurunan stunting melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota, akan tetapi belum memfokuskan program dan kegiatan di lokus yang telah ditetapkan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan penurunan stunting hampir terlaksana di 11 Kabupaten/Kota. Dengan menggabungkan kegiatan lain sekaligus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi di TPPS kecamatan, satu Kabupaten secara khusus mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan monitoring dan evaluasi kecamatan.

Pelaporan kinerja percepatan penurunan stunting persemester telah dilaporkan sesuai dengan format yang telah diberikan. Proses pengumpulan data dan pelaporan sebagian besar dilakukan oleh Satgas Stunting Kabupaten/Kota yang didapatkan atau bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau sektor terkait. Tahun ini, skema pengumpulan data, telah dilakukan perbaikan dengan melakukan pengisian bersama untuk indikator laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting.

e. Peran Pemangku Kepentingan

Peran pemangku kepentingan telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penandatanganan komitmen dalam percepatan penurunan stunting di 8 aksi konvergensi pada aksi ke-3. Bentuk dukungan lainnya direalisasikan dalam pembuatan beberapa kebijakan terkait percepatan penurunan stunting di Kabupaten/Kota.

f. Pencapaian Indikator Perpres 72/21 dan RAN PASTI

Pencapaian indikator Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia tersampaikan pada pelaporan kinerja setiap semester dan penginputan master analisis situasi pada Web Aksi Bangsa Kemendagri

RI. Beberapa indikator yang dianggap sulit dicapai atau data tidak tersedia atau tidak sesuai dengan program yang ada, diantaranya cakupan keluarga berisiko stunting yang mendapatkan bantuan tunai, tidak secara detail disebutkan didalam kegiatan dari dinas yang memberikan bantuan sosial. Cakupan keluarga pra sejahtera yang menerima bantuan tunai masyarakat dan Keluarga pra sejahtera yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), keluarga pra sejahtera yang mendapatkan bantuan di Desa, cakupan keluarga berisiko stunting yang mendapatkan pendampingan, Cakupan Keluarga Resiko Stunting (KRS) yang mendapatkan promosi konsumsi ikan, selanjutnya data yang mendapatkan ASI eksklusif. Data ini cukup sulit didapatkan mengingat beberapa kabupaten kota cakupan ASI cukup rendah dibawah 60 %. Peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) bersama Tim Pendamping Keluarga juga masih jauh dari target yang ditetapkan termasuk program inovasi Desa untuk Stunting. Selain itu ada indikator perubahan perilaku yang sulit di capai yaitu perilaku ketersediaan jamban sehat dan air minum layak serta sanitasi.

g. Permasalahan dan Kendala

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan didapatkan beberapa permasalahan sebagai berikut.

- 1) Permasalahan pada isian data aksi Bangda yang kesulitan untuk memenuhi isiannya. (operator yang mengisi tidak ada/orangnya terbatas)
- 2) Belum adanya anggaran dalam percepatan penurunan stunting terutama kegiatan Monitoring Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten ke Tim Percepatan Penurunan Stunting kecamatan, dan Tim Percepatan Penurunan Stunting kecamatan ke Tim Percepatan Penurunan Desa.
- 3) Pemahaman anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting yang hadir pada saat wawancara belum dapat memberikan jawaban yang sesuai karena adanya pergantian pejabat dilingkungan pemerintahan yang menjadi anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting.

- 4) Komitmen anggota dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengurus Tim Percepatan Penurunan Stunting tahun ini sedikit mengalami penurunan (beberapa alasan karena hasil penilaian kinerja tidak terlalu baik yang didapatkan dari Kabupaten/kota, padahal mereka sudah berusaha keras melakukan kegiatan sesuai dengan siklus yang dibuat dan mengunggahnya kedalam web Aksi Bangda.
- 5) Program kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting kecamatan dan Tim Percepatan Penurunan Stunting desa belum tertulis dan terdokumentasi dengan baik sehingga belum semua membuat laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting belum membuat laporan mengenai percepatan penurunan stunting dan aturan, serta mekanismenya belum ditetapkan untuk pelaporan ke Tim Percepatan Penurunan Stunting kabupaten.
- 6) Pemanfaatan data belum optimal dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
- 7) Adanya kendala untuk kesejahteraan Tim Pendamping Keluarga sebagai ujung tombak didalam pendampingan Keluarga beresiko stunting.
- 8) Data BAAS belum optimal dimanfaatkan untuk pemberian bantuan pada 7 dari 11 kabupaten /kota yang ada
- 9) Kurangnya pemahaman mengenai Tim Percepatan Penurunan Stunting, program kerja dan lain-lainnya berdasarkan pertanyaan yang diberikan kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kecamatan.

h. Harapan

Beberapa harapan yang dapat diusulkan didalam kegiatan monev ini adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pendanaan khusus untuk pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terutama untuk Tim Percepatan Penurunan Stunting provinsi melakukan monitoring dan evaluasi ke Kabupaten dan kabupaten ke kecamatan seterusnya kecamatan ke desa.
- 2) Adanya dukungan pendaan yang lebih baik untuk TPK.

- 3) Data yang dihasilkan baik ditingkat desa maupun kecamatan kabupaten/kota dapat dimanfaatkan untuk kegiatan intervensi PPS di locus stunting.

2.2.2 Kesimpulan

Berdasarkan temuan monitoring dan evaluasi semester 1 tahun 2024 ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- a. TPPS telah sesuai dengan SK atau petunjuk yang ada didalam Perpres 2 tahun 2021 di 11 Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- b. Terdapat anggota TPPS Kabupaten/Kota yang masih belum memahami jabatan dan tugas fungsinya sebagai anggota. Apalagi yang datang mewakili pada saat wawancara jarang terlibat didalam kegiatan TPPS.
- c. Sebagian besar TPPS Kabupaten/kota belum memiliki program kerja setiap bidang sesuai dengan tugas dan fungsi pada SK.
- d. Penganggaran percepatan penurunan stunting di Kabupaten/Kota masih terbatas. Program dan kegiatan serta penganggaran terkait percepatan penurunan stunting di laporkan pada Web Aksi Bangsa Kemendagri RI pada aksi ke-2.
- e. Belum terdapat anggaran percepatan penurunan stunting di tingkat Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan.
- f. Penganggaran percepatan penurunan stunting di Pemerintah Desa telah tersedia melalui Dana Desa, akan tetapi sangat bergantung pada komitmen Pemerintahan Desa dan Kepala desanya.
- g. Sebagian besar implementasi kegiatan melalui anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana Kabupaten/Kota masih belum terlaksana sesuai jadwal, khususnya pendampingan yang dilakukan Tim Pendamping Keluarga.
- h. Peran serta lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten/Kota sudah cukup baik.
- i. Sebagian besar Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota belum melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja percepatan penurunan stunting.

- j. Program dan kegiatan percepatan penurunan stunting belum berfokus pada desa/kelurahan lokus stunting yang ditetapkan.
- k. Belum tersedia sistem/skema pengumpulan data dan pelaporan terkait percepatan penurunan stunting.
- l. Telah terbentuk komitmen dari pemangku kepentingan di seluruh Kabupaten/Kota.
- m. Terdapat beberapa indikator yang dianggap sulit dicapai atau data tidak tersedia atau tidak sesuai dengan program yang ada. atau sulit mendapatkan datanya

2.2.3 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

a. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Anggota TPPS:

Diperlukan pelatihan yang intensif dan terstruktur untuk anggota TPPS di kabupaten/kota, terutama bagi yang belum memahami jabatan dan tugas fungsinya. Pelatihan ini dapat difokuskan pada penguatan kapasitas peran serta tanggung jawab masing-masing anggota sesuai dengan SK dan petunjuk Perpres 72 tahun 2021 dan RAN PASTI.

b. Penyusunan Program Kerja TPPS:

Setiap TPPS kabupaten/kota perlu segera menyusun program kerja yang jelas untuk setiap bidang, sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam SK. Program kerja ini harus mencakup kegiatan yang spesifik, terukur, dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas.

c. Peningkatan Penganggaran untuk Percepatan Penurunan Stunting:

Perlu adanya alokasi anggaran yang lebih memadai di tingkat kabupaten/kota serta kecamatan dan kelurahan. Pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian dalam perencanaan anggaran agar mencakup pendanaan untuk percepatan penurunan stunting, termasuk melalui APBD, Dana Desa, dan sumber lainnya yang tersedia.

d. Pemanfaatan Dana Desa untuk Program Stunting:

Perlu adanya pendampingan dan arahan kepada Pemerintahan Desa untuk memprioritaskan penggunaan Dana Desa bagi program-program percepatan penurunan stunting. Komitmen dari Pemerintah Desa dan Kepala Desa sangat penting untuk memastikan alokasi dana yang efektif.

e. Perbaikan Pelaksanaan Anggaran BOKB:

Diperlukan peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana di kabupaten/kota agar kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal dan rencana.

f. Penguatan Peran Lintas Sektor:

Meskipun peran serta lintas sektor sudah cukup baik, perlu ditingkatkan lagi koordinasi antar sektor untuk memastikan integrasi program dan kegiatan yang lebih efektif dalam percepatan penurunan stunting di daerah.

g. Monitoring dan Evaluasi Kinerja TPPS:

Setiap Tim Percepatan Penurunan Stunting kabupaten/kota perlu mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengevaluasi keberhasilan program dan kegiatan, serta melakukan perbaikan berkelanjutan baik di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

h. Fokus pada Desa/Kelurahan Lokus Stunting:

Program dan kegiatan percepatan penurunan stunting perlu difokuskan lebih intensif pada desa/kelurahan lokus stunting yang telah ditetapkan, dengan strategi dan intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing lokasi.

i. Pengembangan Sistem Pengumpulan Data dan Pelaporan:

Perlu segera dibentuk sistem atau skema pengumpulan data dan pelaporan yang terintegrasi terkait percepatan penurunan stunting. Sistem ini akan membantu dalam pemantauan dan evaluasi program secara lebih akurat dan efisien.

j. Penguatan Komitmen Pemangku Kepentingan:

Komitmen yang telah terbentuk dari pemangku kepentingan di seluruh kabupaten/kota perlu terus dipertahankan dan diperkuat melalui kerjasama, komunikasi, dan koordinasi yang berkelanjutan.

k. Peningkatan Ketersediaan Data dan Indikator:

Diperlukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas data terkait indikator percepatan penurunan stunting. Ini termasuk pengumpulan data yang lebih akurat, valid, dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan program.

2.3 Monitoring dan Evaluasi TPPS Kecamatan

2.3.1 Profil Temuan

Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan kepada anggota pengurus TPPS Kecamatan dengan menggunakan instrumen formulir monitoring dan evaluasi, didapatkan informasi sebagai berikut.

a. Legal aspek

Untuk semua kecamatan yang menjadi responden pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan menyatakan bahwa 11 dari 11 kecamatan, Tim Percepatan Penurunan Stunting kecamatan telah mempunyai SK Bupati tahun 2022 dan mempunyai 3 ketua bidang yang sesuai dengan format surat keputusan yang telah ditetapkan yaitu bidang Koordinasi dan Pergerakan lapangan, bidang Koordinasi dan Pelayanan dan yang terakhir adalah Bidang Data. Untuk kebijakan lain yang terkait percepatan penurunan stunting dari ke 11 Kecamatan ini masih bersifat himbauan untuk pencapaian data elsimil yaitu himbauan untuk catin untuk dapat memeriksakan diri ke Petugas kesehatan paling tidak 3 bulan sebelum menikah. Kecamatan lainnya himbauan berupa pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting ini dilakukan dengan menggerakkan Kepala Desa/Kelurahan, Puskesmas, dan Penyuluh Keluarga Berencana,

penyuluh, Tim Pendamping Keluarga dan lainnya, terutama dukungan pada kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting.

b. Perencanaan dan Penganggaran

Semua kecamatan telah melaksanakan Kegiatan Rembuk Stunting tingkat kecamatan, yang rata-rata dilaksanakan pada bulan April. Tim Percepatan Penurunan Stunting kecamatan terlibat didalam kegiatan Musrembang, 11 dari 11 Kecamatan ini terlibat didalam kegiatan tersebut. Akan tetapi 8 dari 11 ikut memantau pelaksanaan pengalokasian dana desa untuk percepatan penurunan stunting. Tentu saja perencanaan di desa lebih banyak yang mengarah kepada kegiatan percepatan penurunan stunting, berbeda dengan kelurahan yang mininm perencanaan kegiatan percepatan penurunan stunting. 11 dari 11 kecamatan mengikuti kegiatan musrembang ditingkat kecamatan dan turut mendorong penganggaran untuk kegiatan percepatan penurunan stunting, walaupun kegiatan yang dianggarkan cukup minimal, berupa kegiatan monev dana desa, kegiatan pemberian PMT didesa, bila di rata-ratakan sejumlah angka 10 - 20 juta perkecamatan (terdiri dari kegiatan monitoring dan evaluasi serta perjalanan dinas).

c. Implementasi

Pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting 11 kecamatan untuk kegiatan minilok telah berjalan dengan jadwal yang ditetapkan, 11 kecamatan melaksanakan pada bulan Maret 2024, maka hingga juni telah melaksanakan sebanyak 4 kali. Dengan melibatkan semua aspek yang terlibat PPS didalam kegiatan minilok. Untuk partisipasi keterlibatan swasta untuk 4/11 kecamatan seperti di kecamatan Betara, geragai, batang masumai, telah mendapatkan bantuan dari Perusahaan PT. Jade Stone, PT. Trans Gas Indonesia, PT SAL, PT. Indonusa, PT. Muji Sari untuk pemberian PMT dan susu, dan Petrochina untuk alat Antropometri Kit serta pelatihan penggunaannya. Sedangkan untuk pengawasan kecamatan

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024

ke kelurahan/desa dilakukan dengan peninjauan langsung maupun datang pada kegiatan posyandu.

d. Ketersediaan dan Pemanfaatan Data

2 dari 22 Kecamatan data tidak terupdated kepada ketua TPPS, data KRS tidak dipegang dan diketahui oleh Ketua TPPS kecamatan. Termasuk data e-PPBGM tidak dipahami oleh ketua TPPS. 10/11 ketua TPPS memahami kegiatan minilok dan mendorong anak untuk datang ke posyandu.

e. Pelaporan Pemantauan, Evaluasi

Secara keseluruhan dari kecamatan yang ada membuat laporan TPPS yang merupakan Rekapitan dari kegiatan yang ada didesa, dengan meminta format dari TA Stunting, dan membuat laporan kegiatan TPPS kecamatan dengan di bantu Kaur Pembangunan, Penyuluh KB, dan dari Puskesmas

f. Inovasi

Beberapa inovasi yang dibuat dikecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Inovasi yang dilakukan pada Kecamatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi

NO.	Kecamatan	Inovasi	Keterangan
1.	Sarolangun	Belum ada	
2.	Pemayung dan Muaro Bulian	Belum ada	
3.	Sekernan dan Maro. Sebapo	Belum ada	
4.	Kota Baru dan Jelutung	BASUH ANTING Bapak asuh anak Pelatihan kader-kader kesehatan	1) Jumat barokah untuk anak stunting 2) Pembuatan makanan bergizi di dampingi Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
3.	Geragai dan Sabak Barat	Belum ada inovasi	
4.	Tungkal Ilir dan Betara	Masih dalam perencanaan	
5.	Tebo ulu dan Sekcam Rimbo ilir	Rumah stunting	Rumah yang dibentuk di tingkat desa untuk menampung permasalahan stunting di desa
6.	Pasar Muaro. Bungo dan Rimbo	Sipaling santun	Aplikasi berbasis web, yang mempunyai titik basis KRS dan

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024

	Tengah		anak Stunting di Desa dikembangkan Kabupaten
7.	Batang Masumai dan Nalo Tantan	Pemanfaatan lahan dengan tanaman pangan (mie dari ikan lele	Pemanfaatan lahan didesa
10.	Air Hangat dan Air Hangat Barat	Diversifikasi kegiatan posyandu	Di dua kecamatan
11.	Pondok tinggi dan Pesisir bukit	<i>Insert posting</i> (intervensi serentak pondok tinggi stop stunting	Bantuan dana kejaksanaan untuk ibu dan balita kurang energi kronik.

g. Permasalahan dan kendala

Dari 2 dari 22 kecamatan mengalami masalah teknis karena keterbatasan tenaga teknis yang memahami percepatan penurunan stunting. 4 dari 11 kecamatan yang mempunyai kelurahan, kesulitan untuk alokasi dana dan kegiatan percepatan penurunan stunting, termasuk Posyandu yang standart termasuk alat dan sumberdaya yang ada, kalah dengan klinik yang tersedia di tingkat kota.

h. Harapan

Beberapa harapan yang dapat diusulkan didalam kegiatan monev ini adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya program kerja TPPS kecamatan yang sesuai dan dijalankan oleh TPPS kecamatan
- 2) Adanya penguatan kapasitas bagi TPPS kecamatan, sehingga dapat menjalan kegiatan Percepatan di wilayahnya masing-masing
- 3) Adanya dukungan pendanaan bagi kegiatan TPPS kecamatan terutama untuk kegiatan monev dan dukungan teknis untuk TPPS terutama untuk ketua TPPS kecamatan.

2.3.2 Kesimpulan

Berasarkan hasil/temuan diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Seluruh kecamatan yang menjadi responden telah memiliki SK. Namun, kebijakan terkait percepatan penurunan stunting sebagian besar masih

- berupa himbauan dan belum menjadi regulasi yang mengikat, khususnya dalam pencapaian data ELSIMIL dan kegiatan lainnya.
- b. Semua TPPS Kecamatan telah melaksanakan kegiatan rembuk stunting dan terlibat dalam Musrenbang.
 - c. Pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting berjalan sesuai jadwal, dengan partisipasi dari berbagai pihak.
 - d. Masih terdapat kendala dalam pemahaman dan pemanfaatan data oleh ketua TPPS kecamatan, di mana beberapa kecamatan tidak memiliki data yang terupdate atau belum memahami sepenuhnya data terkait stunting, seperti data KRS dan e-PPBGM.
 - e. Pelaporan TPPS belum berjalan optimal di tingkat kecamatan karena tidak ada format baku pelaporan.
 - f. Beberapa kecamatan telah mengembangkan inovasi untuk mendukung percepatan penurunan stunting, seperti aplikasi berbasis web, pemanfaatan lahan, dan diversifikasi kegiatan posyandu. Namun, sebagian besar kecamatan masih belum memiliki inovasi yang spesifik dan perlu didorong untuk mengembangkan solusi kreatif yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
 - g. Beberapa kecamatan menghadapi masalah teknis, terutama terkait dengan keterbatasan tenaga teknis yang memahami program penurunan stunting dan kesulitan dalam alokasi dana untuk kegiatan percepatan penurunan stunting, terutama di kelurahan dan posyandu.

2.3.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil/temuan di atas dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penguatan Kapasitas TPPS Kecamatan:
Perlu adanya peningkatan kapasitas mereka dalam menjalankan program percepatan penurunan stunting. Kecamatan juga perlu menyusun rencana kerja TPPS dari setiap bidang kepengurusan.
- b. Penguatan Kebijakan dan Regulasi

Perlu ditingkatkan dari hanya sebatas himbauan menjadi kebijakan yang lebih tegas dan terstruktur, misalnya dengan mengeluarkan kebijakan tertulis yang mendukung kegiatan percepatan penurunan stunting. Kecamatan juga dapat mendorong keterlibatan aktif dari kepala desa/kelurahan, puskesmas, penyuluh KB, dan lainnya untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting melalui surat edaran atau peraturan yang jelas.

c. Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran:

Diperlukan dukungan anggaran terkait percepatan penurunan stunting dalam optimalisasi peran TPPS Kecamatan. Kecamatan juga diharapkan melakukan pendampingan pengalokasian dana desa dan kelurahan agar lebih fokus untuk kegiatan percepatan penurunan stunting dengan melibatkan sektor terkait (Puskesmas, Penyuluh KB). Kecamatan juga diharapkan dapat menyusun rencana kerja yang lebih terarah dan komprehensif yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk OPD, sektor swasta, dan masyarakat.

d. Implementasi dan Keterlibatan Swasta:

Mengajak lebih banyak perusahaan swasta untuk berpartisipasi dalam program penurunan stunting melalui CSR atau kemitraan strategis lainnya.

e. Peningkatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data:

Memastikan kecamatan memiliki data terupdate terkait percepatan penurunan stunting (Kasus Stunting, Keluarga Berisiko Stunting, ELSIMIL). Perlu juga dilakukan pelatihan dan dukungan teknis bagi ketua TPPS di kecamatan untuk memahami dan menggunakan data percepatan penurunan stunting secara efektif.

f. Pengembangan Inovasi dan Praktik Baik:

Mendorong setiap kecamatan untuk mengembangkan inovasi lokal yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga diharapkan dapat mendokumentasikan praktik-praktik baik dan inovasi yang sudah ada untuk kemudian direplikasi di kecamatan lain yang membutuhkan.

g. Fokus pada Lokus Stunting:

Memastikan bahwa program dan kegiatan percepatan penurunan stunting fokus pada desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokus stunting, dengan pendekatan intervensi yang sesuai dan terintegrasi.

h. Pelaporan dan Evaluasi yang Lebih Baik:

Diperlukan format pelaporan yang baku dalam pelaporan TPPS Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Melakukan evaluasi berkala untuk menilai

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024

efektivitas program dan kegiatan, serta melakukan perbaikan yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi.

2.4 Monitoring dan Evaluasi TPPS Desa/Kelurahan

2.4.1 Profil Temuan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi TPPS Desa/Kelurahan yang telah dilaksanakan dapat digambarkan karakteristik responden sebagai berikut.

Tabel 6. Karakteristik Responden Money TPPS Desa/Kelurahan

Variabel	Jumlah Responden	%
Desa/Kelurahan		
Pemerintah Desa	17	60,71
Pemerintah Kelurahan	11	39,29
Responden TPPS Desa/Kelurahan		
Ketua TP PKK	18	64,29
Sekretaris TP PKK	3	10,71
Lurah/Kepala Desa	3	10,71
Sekretaris Lurah/Desa	1	3,57
Kasi Kesra	1	3,57
Kasi Pembangunan	1	3,57
Bidan	1	3,57

Berdasarkan tabel 6 diatas diketahui bahwa sasaran yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi TPPS Desa/Kelurahan terdiri dari 60,71% Pemerintah Desa dan 39,29% Pemerintah Kelurahan. Peserta yang hadir dalam pelaksanaan money selaku Ketua Tim Percepatan Penuruna Stunting Desa/Kelurahan (Ketua TP PKK) sebanyak 64,29%, sedangkan yang lainnya diwakilkan dari unsur sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sebesar 10,71%, Lurah/Kepala Desa 10,71%, Sekretaris Lurah/Desa, Kasi Kesra, Kasi Pembangunan, dan Bidan masing-masing 3,57% dari total 28 responden. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Tim Percepatan Penuruanan Stunting Desa/Kelurahan yang dilaksanakan secara *focus group discusion* di masing-masing Kabupaten/Kota didapatkan hasil dengan penjabaran 8 aspek (legas aspek, perencanaan dan penganggaran, fungsi koordinasi, kegiatan prioritas pelaksanaan pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga bersama mitra,

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024

ketersediaan dan pemanfaatan data, pemantauan evaluasi dan pelaporan, inovasi, dan masalah/kendala) dengan rincian sebagai berikut.

a. Legal Aspek

Tabel 7. Gambaran Legal Aspek TPPS Desa/Kelurahan

Variabel Legal Aspek	Jumlah Responden	%
Ketersediaan SK TPPS	28	100,00
Kesesuaian SK TPPS	25	89,29
Kebijakan Lain Terkait PPS	11	39,29

Berdasarkan tabel 7 diatas, Seluruh Desa/Kelurahan yang menjadi responden telah memiliki Surat Keputusan (SK) TPPS. Hal ini menunjukkan bahwa semua Desa/Kelurahan telah secara resmi mengakui dan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), yang merupakan langkah penting dalam upaya penurunan stunting. Akan tetapi, terkait dengan kesesuaian struktur TPPS Desa/Kelurahan masih terdapat 10,71% yang tidak sesuai dengan juknis Peraturan Presiden 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan BKKBN RI Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 2021-2024 bahwa struktur TPPS Desa/Kelurahan diketuai oleh Ketua TP PKK Desa/Kelurahan. Setelah dilakukan wawancara mendalam dan pembuktian dokumen sebagian besar responden tidak dapat menjelaskan posisi dan tugas peran masing-masing dari anggota TPPS Desa/Kelurahan, serta tidak dapat membuktikan ketersediaan dari bentuk fisik atau file SK TPPS Desa/Kelurahan tersebut.

Aspek komitmen Desa/Kelurahan dalam penerbitan kebijakan mendukung percepatan penuruna stunting didapatkan 11 dari 28 Desa/Kelurahan atau 39,29% yang memiliki kebijakan lain yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting (PPS). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian Desa/Kelurahan masih belum memiliki kebijakan tambahan yang mendukung upaya penurunan stunting, sehingga perlu

dorongan lebih lanjut untuk meningkatkan jumlah desa/kelurahan yang mengadopsi kebijakan-kebijakan tambahan tersebut.

b. Perencanaan dan Penganggaran

Tabel 8 Gambaran pelaksanaan Rembuk Stunting dan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran TPPS Desa/Kelurahan

Variabel Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Responden	%
TPPS Desa/Kelurahan Melaksanakan Rembuk Stunting	14	50,00
Tersedia Kegiatan dan Anggaran pada Dokumen Perencanaan	18	64,29

Dari total 28 Desa/Kelurahan yang ada, sebanyak 50% atau 14 Desa/Kelurahan telah melaksanakan kegiatan rembuk stunting. Ini menunjukkan bahwa setengah dari Desa/Kelurahan tersebut aktif dalam upaya penurunan stunting melalui kegiatan rembuk yang melibatkan berbagai pihak terkait. Sebanyak 64,29% atau 18 Desa/Kelurahan dari total 28 Desa/Kelurahan telah memasukkan kegiatan dan anggaran untuk penanganan stunting dalam dokumen perencanaan mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar Desa/Kelurahan sudah menyadari pentingnya penanganan stunting dan telah mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan tersebut dalam perencanaan tahunan mereka.

c. Fungsi Koordinasi Ketua TPPS dan Koordinator Bidang TPPS

Koordinasi yang dilakukan TPPS Desa/Kelurahan dengan Bidang Lapangan TPK (Tim Pendamping Keluarga) sudah berjalan dengan baik. Fungsi koordinasi internal TPPS Desa/Kelurahan dalam hal ini dapat dianggap efektif serta didukung dengan adanya syarat pelaporan dan pengesahan laporan visum Tim Pendamping Keluarga (TPK) setiap bulannya. Koordinasi yang baik dengan Bidang Lapangan TPK menunjukkan adanya sinergi dan komunikasi yang lancar dalam upaya penurunan stunting, sehingga program-program dan intervensi yang direncanakan dapat dijalankan dengan efektif dan tepat sasaran.

Fungsi koordinasi internal Tim Percepatan Penurunan Stunting dengan Bidang Lapangan Data belum sepenuhnya optimal, didapatkan

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024

informasi masih ada Ketua TPPS Desa/Kelurahan atau responden belum terpapar dengan data terkait percepatan penurunan stunting. Hal ini dapat berdampak pada ketidakakuratan atau keterlambatan dalam pengumpulan dan analisis data, yang merupakan komponen penting dalam pemantauan dan evaluasi program penurunan stunting. Data yang akurat dan terkini sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi daerah yang membutuhkan intervensi segera dan untuk memantau kemajuan program.

a. Kegiatan Prioritas Pelaksanaan Pendampingan Keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga bersama Mitra

Tabel 9. Gambaran Pelaksanaan Kegiatan Program Prioritas Pendampingan Keluarga oleh TPK bersama Mitra

Variabel Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Pendampingan Keluarga oleh TPK Bersama Mitra	Jumlah Responden	%
Pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh desa/kelurahan	28	100,00
Orientasi manajemen dan substansi Stunting bagi TPK	28	100,00
KIE kelompok keluarga berisiko Stunting; dan KIE Interpersonal kepada keluarga berisiko Stunting	28	100,00
Pendampingan Ibu Hamil	28	100,00
Pendampingan ibu pascapersalinan	28	100,00
Pendampingan PUS ingin anak ditunda (IAT) atau tidak ingin anak lagi (TIAL)	28	100,00
Pendampingan keluarga dengan anak usia 0-23 bulan	28	100,00
Pemantauan berat badan dan panjang/tinggi badan balita 0-59 bulan sesuai standar/usia	28	100,00
Pemantauan perkembangan balita 0-59 bulan sesuai standar/usia	28	100,00
Fasilitasi keluarga prasejahtera berisiko Stunting penerima bantuan social	23	82,14
Fasilitasi terhadap akses air minum layak bagi keluarga berisiko Stunting	23	82,14
Fasilitasi kepemilikan rumah layak huni bagi keluarga berisiko Stunting	20	71,43
Fasilitasi jamban sehat bagi keluarga berisiko Stunting	20	71,43
Dapur Gizi Keluarga di desa prioritas Stunting berbasis pangan lokal	22	78,57
Pemantauan perkembangan balita 0-23 bulan sesuai standar/usia	28	100,00
Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis	28	100,00
Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan gizi kurang	28	100,00
Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan gizi buruk	28	100,00
Pendampingan Semua Calon Pengantin Calon Pasangan Usia Subur (PUS)/ Pendampingan Catin 3 (tiga) bulan sebelum menikah	8	28,57

Berdasarkan tabel diatas, Seluruh desa/kelurahan telah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK), semua TPK telah menerima orientasi

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024

terkait manajemen dan substansi stunting, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) telah dilaksanakan secara menyeluruh, pendampingan ibu hamil dilakukan di semua desa/kelurahan, ibu pascapersalinan menerima pendampingan yang komprehensif, pendampingan terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin menunda atau tidak ingin anak lagi dilaksanakan dengan baik, keluarga dengan anak usia 0-23 bulan mendapatkan pendampingan, pemantauan pertumbuhan balita dilakukan secara menyeluruh, pemantauan perkembangan balita dilakukan dengan baik di seluruh desa/kelurahan, seluruh baduta 0-23 bulan telah dipantau sesuai standar/usia, pendampingan kepada seluruh balita dengan infeksi kronis, gizi kurang, dan gizi buruk juga sudah dilakukan dengan baik.

Akan tetapi terdapat beberapa hal yang belum terlaksana 100%, diantaranya Desa/Kelurahan yang telah memfasilitasi bantuan sosial untuk keluarga prasejahtera yang berisiko stunting sebesar 82,14%, Desa/Kelurahan yang telah menyediakan akses air minum layak bagi keluarga berisiko stunting sebesar 82,14%, Desa/Kelurahan yang telah memfasilitasi kepemilikan rumah layak huni bagi keluarga berisiko stunting sebesar 71,43%, Desa/Kelurahan yang telah memfasilitasi jamban sehat bagi keluarga berisiko stunting sebesar 71,43%, Desa/Kelurahan yang memiliki dapur gizi berbasis pangan lokal sebesar 78,57%, serta Hanya sebagian kecil desa/kelurahan yang telah melakukan pendampingan bagi calon pengantin tiga bulan sebelum menikah. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan pranikah masih perlu ditingkatkan di banyak desa/kelurahan.

d. Ketersediaan dan Pemanfaatan Data

Tabel 10. Gambaran Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Percepatan Penurunan Stunting di TPPS Desa/Kelurahan

Variabel Ketersediaan dan Pemanfaatan Data	Jumlah Responden	%
Tersedia dan terupdate data Kasus Stunting	26	92,86
Tersedia dan terupdate data Keluarga Berisiko Stunting	17	60,71
Pemanfaatan Data Kasus Stunting	14	50,00
Pemanfaatan Data Keluarga Berisiko Stunting	6	21,43

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024

Sebanyak 26 responden (92,86%) menyatakan bahwa data kasus stunting tersedia dan terupdate. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki data yang cukup untuk memantau kasus stunting. Sebanyak 17 responden (60,71%) menyatakan bahwa data keluarga berisiko stunting tersedia dan terupdate. Meskipun cukup tinggi, persentase ini lebih rendah dibandingkan data kasus stunting, yang mungkin menunjukkan bahwa data mengenai keluarga berisiko belum sepenuhnya terjangkau.

Sebanyak 14 responden (50,00%) menggunakan data kasus stunting untuk intervensi atau pengambilan keputusan. Hanya separuh dari responden yang memanfaatkan data tersebut, yang bisa menunjukkan adanya tantangan dalam penggunaan data, baik dari segi pemahaman, akses, atau sumber daya. Hanya 6 responden (21,43%) yang memanfaatkan data keluarga berisiko stunting. Persentase yang rendah ini menandakan bahwa data tentang keluarga yang berisiko tinggi belum banyak digunakan dalam perencanaan atau tindakan pencegahan stunting.

e. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Tabel 11. Gambaran Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan TPPS Desa/Kelurahan

Variabel Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah Responden	%
Ketersediaan laporan TPPS Desa/Kelurahan	2	7,14
TPPS Desa/Kelurahan melakukan Monev pada TPK dalam Pendampingan	22	78,57

Hanya 2 responden (7,14%) yang menyatakan bahwa laporan TPPS di desa/kelurahan mereka tersedia. Ini menunjukkan bahwa pelaporan formal oleh TPPS desa/kelurahan masih sangat minim. Keterbatasan dalam pelaporan ini bisa disebabkan oleh kurangnya kapasitas, sumber daya, atau pemahaman tentang pentingnya dokumentasi dan pelaporan kegiatan, serta belum tersedianya format pelaporan TPPS Tingkat Desa/Kelurahan.

Sebanyak 22 responden (78,57%) menyatakan bahwa TPPS Desa/Kelurahan telah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev)

terhadap Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam kegiatan pendampingan. Tingginya persentase ini menunjukkan bahwa meskipun laporan formal kurang, sebagian besar TPPS tetap aktif dalam melakukan Monev, yang merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa program pendampingan berjalan dengan efektif.

f. Inovasi

Tabel 12. Gambaran Inovasi Percepatan Penurunan Stunting di TPPS Desa/Kelurahan

Variabel Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah Responden	%
Inovasi dalam Percepatan Penurunan Stunting	14	50,00

Sebanyak 14 responden (50%) menyatakan bahwa mereka telah menerapkan inovasi dalam upaya percepatan penurunan stunting di wilayah mereka. Ini menunjukkan bahwa setengah dari responden telah berinisiatif untuk mencari cara baru atau metode yang lebih efektif dalam menurunkan angka stunting. Meskipun ini adalah perkembangan positif, namun jumlahnya masih menunjukkan bahwa ada setengah dari Timpercepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang mungkin belum mengadopsi atau mengembangkan inovasi dalam program mereka. Inovasi yang telah dilakukan oleh TPPS Desa/Kelurahan diantaranya pembuatan rumah stunting untuk penanganan stunting terintegrasi, pemberdayaan masyarakat dalam perkumpulan pengajian, gotong royong, arisan untuk penyampaian edukasi terkait pencegahan stunting, pelibatan lintas sektor dalam partisipasi percepatan penurunan stunting melalui penggalangan dana untuk intervensi stunting, pencegahan pernikahan dini, serta pembuatan berbagai menu makanan tambahan berbasis pangan lokal dengan bahan telur/jantung pisang/daun kelor/papaya/ikan sungai.

g. Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting TPPS Desa/Kelurahan juga mengalami masalah dan kendala sebagai berikut.

- 1) Anggaran Terbatas: Terdapat keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan TPPS, termasuk tidak adanya insentif bagi kader posyandu, minimnya dukungan untuk operasional TPPS, dan pendanaan yang

terbatas untuk PMT, sarana prasarana pendampingan, serta kegiatan sosialisasi. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu penghambat utama dalam pelaksanaan program penurunan stunting. Ini mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari operasional hingga motivasi para kader posyandu dan efektivitas sosialisasi.

- 2) Rendahnya Partisipasi ke Posyandu: Masyarakat kurang berpartisipasi dalam kegiatan posyandu, yang esensial untuk pemantauan kesehatan balita. Beberapa warga bahkan menolak pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan ada kesulitan membawa balita ke posyandu.
- 3) Akses yang Sulit: Kendala akses fisik, seperti jalan yang sulit dilalui, membuat sebagian warga kesulitan menjangkau posyandu
- 4) Pengetahuan dan Kesadaran yang Rendah: Masyarakat masih kurang paham tentang stunting, pola asuh yang baik, dan pentingnya air bersih. Ada juga resistensi dari masyarakat yang tidak ingin diberi label stunting. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai stunting dan faktor-faktor yang mempengaruhinya menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif dan efektif.
- 5) Keterbatasan SDM, Sarana, dan Prasarana: Jumlah Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang masih belum mencukupi dan keterbatasan alat antropometri kit menghambat efektivitas monitoring kesehatan balita. Selain itu, ketiadaan sarana seperti air bersih dan jamban yang layak juga merupakan kendala serius.
- 6) Minimnya Dukungan Operasional: Kurangnya dana untuk operasional ketua TPPS dan honor untuk TPPS menambah beban kerja yang tidak sebanding dengan dukungan yang diterima, yang dapat mempengaruhi motivasi dan efektivitas kerja tim. Dukungan operasional yang minim, termasuk honor bagi anggota TPPS, menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk memberikan dukungan yang memadai, agar operasional TPPS dapat berjalan lebih lancar dan efektif.

2.4.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan temuan diatas, dapat disimpulkan dan kemudian direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

a. Karakteristik Responden:

- Mayoritas responden terdiri dari pemerintah desa (60,71%) dan kelurahan (39,29%).
- 64,29% peserta monev merupakan Ketua TPPS (Ketua TP PKK), sementara sisanya diwakili oleh sekretaris TP PKK, Lurah/Kepala Desa, Sekretaris Lurah/Desa, Kasi Kesra, Kasi Pembangunan, dan Bidan.

b. Legal Aspek:

- Seluruh Desa/Kelurahan telah memiliki Surat Keputusan (SK) TPPS.
- 10,71% TPPS Desa/Kelurahan tidak sesuai dengan juknis Peraturan Presiden dan Peraturan BKKBN terkait struktur TPPS.
- 39,29% Desa/Kelurahan memiliki kebijakan tambahan terkait percepatan penurunan stunting.

c. Perencanaan dan Penganggaran:

- 50% Desa/Kelurahan telah melaksanakan rembuk stunting.
- 64,29% Desa/Kelurahan telah memasukkan kegiatan dan anggaran stunting dalam perencanaan mereka.

d. Fungsi Koordinasi:

- Koordinasi internal TPPS dengan Bidang Lapangan TPK sudah berjalan baik.
- Koordinasi dengan Bidang Lapangan Data belum optimal; beberapa Ketua TPPS belum terpapar data terkait stunting.

e. Kegiatan Prioritas Pelaksanaan Pendampingan:

- Seluruh Desa/Kelurahan telah membentuk TPK dan melaksanakan pendampingan terkait stunting.
- Beberapa aspek pendampingan, seperti bantuan sosial, akses air minum layak, rumah layak huni, jamban sehat, dan dapur gizi belum terlaksana sepenuhnya.

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024

- f. Ketersediaan dan Pemanfaatan Data:
 - 92,86% responden memiliki data kasus stunting yang tersedia dan terupdate.
 - 50% responden menggunakan data kasus stunting untuk intervensi.
 - Pemanfaatan data keluarga berisiko stunting masih rendah (21,43%).
- g. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan:
 - Hanya 7,14% responden yang menyatakan laporan TPPS tersedia, menunjukkan pelaporan formal masih sangat minim.
 - 78,57% responden melakukan monitoring dan evaluasi terhadap TPK.
- i. Inovasi:
 - 50% responden telah menerapkan inovasi dalam upaya percepatan penurunan stunting.
 - Inovasi yang diterapkan meliputi pembuatan rumah stunting, pemberdayaan masyarakat, dan pembuatan menu makanan tambahan berbasis pangan lokal.
- j. Masalah dan Kendala:
 - Keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, akses fisik yang sulit, dan minimnya dukungan operasional menjadi hambatan utama dalam penurunan stunting.
 - Pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait stunting masih rendah.
 - Keterbatasan SDM, sarana, dan prasarana, termasuk alat antropometri kit dan infrastruktur dasar seperti air bersih dan jamban, menjadi kendala serius.

2.4.3 Rekomendasi

- a. Peningkatan Kapasitas TPPS dan Kebijakan:
 - Memastikan Struktur Organisasi TPPS Desa/Kelurahan diketuai oleh Ketua TP PKK Desa/Kelurahan.
 - Pelatihan dan bimbingan teknis dapat diberikan untuk memastikan bahwa seluruh TPPS Desa/Kelurahan memahami peran dan tugas masing-masing.

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024

- Peningkatan Kebijakan Pendukung: Dorong lebih banyak Desa/Kelurahan untuk mengadopsi kebijakan tambahan yang mendukung percepatan penurunan stunting. Ini bisa dilakukan dengan menyediakan panduan praktis untuk pengembangan kebijakan lokal yang mendukung upaya penurunan stunting
- b. Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran:
- Peningkatan Rembuk Stunting: Seluruh Desa/Kelurahan untuk melaksanakan rembuk stunting minimal 1 kali dalam setahun, melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen, serta dukungan program kegiatan terhadap penurunan stunting.
 - Integrasi Anggaran Stunting: Pastikan bahwa alokasi anggaran untuk penanganan stunting menjadi bagian dari perencanaan tahunan Desa/Kelurahan, serta monitor realisasi anggaran tersebut untuk memastikan efektivitas penggunaan dana.
- c. Penguatan Fungsi Koordinasi:
- Pelatihan Data dan Monitoring: Adakan pelatihan khusus untuk Ketua TPPS dan anggota terkait pemanfaatan data stunting. Fokuskan pada pentingnya data dalam pengambilan keputusan dan cara memanfaatkan data yang ada untuk intervensi yang lebih tepat sasaran.
 - Meningkatkan Koordinasi Internal: Memperkuat koordinasi antar bidang dalam TPPS, sehingga setiap intervensi dan program dapat saling mendukung dan berkontribusi pada penurunan stunting secara holistik.
- d. Peningkatan Implementasi Kegiatan Prioritas:
- Peningkatan Akses Layanan Kesehatan: Tingkatkan akses keluarga berisiko stunting ke layanan dasar seperti air minum layak, rumah layak huni, dan jamban sehat. Program bantuan sosial dan fasilitas publik harus difokuskan untuk menjangkau keluarga dengan risiko tinggi stunting.

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024

- Penguatan Pendampingan Pranikah: Perluas cakupan pendampingan bagi calon pengantin untuk mencakup seluruh Desa/Kelurahan, dengan tujuan mencegah stunting sejak sebelum kehamilan, melalui dukungan kebijakan pemerintah desa/kelurahan.
- e. Peningkatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data:
 - Memperkuat Sistem Data: Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan dan pemutakhiran data keluarga berisiko stunting secara menyeluruh di semua Desa/Kelurahan.
 - Meningkatkan Pemanfaatan Data: Sosialisasikan pentingnya pemanfaatan data stunting dan keluarga berisiko dalam perencanaan program dan pengambilan keputusan, dengan memberikan contoh konkret bagaimana data tersebut bisa digunakan untuk intervensi yang lebih efektif.
- f. Meningkatkan Pelaporan dan Evaluasi:
 - Diperlukan format pelaporan TPPS yang baku ditingkat Desa/Kelurahan. Serta mengadakan sosialisasi dan pelatihan tentang pentingnya pelaporan dan cara menyusun laporan yang sesuai.
 - Tingkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap proses pelaporan di TPPS Desa/Kelurahan, dengan memberikan feedback konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan.
- g. Mendorong Replikasi Inovasi dan Praktik Baik:
 - Fasilitasi Pertukaran Inovasi: Adakan forum atau kelompok diskusi antar TPPS untuk berbagi inovasi dan praktik terbaik dalam percepatan penurunan stunting. Dokumentasikan dan sebarkan ide-ide inovatif yang terbukti efektif.
 - Dukungan untuk Inovasi Baru: Berikan dukungan berupa pendanaan atau fasilitas tambahan bagi Desa/Kelurahan yang ingin mengembangkan atau menerapkan inovasi baru dalam upaya percepatan penurunan stunting.

h. Mengatasi Masalah dan Kendala:

- Pengalokasian Dana Tambahan: Usahakan pengalokasian dana tambahan dari pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) atau pusat untuk mendukung operasional TPPS (khususnya pemerintah kelurahan), termasuk insentif bagi kader posyandu dan kebutuhan alat-alat antropometri.
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Lakukan kampanye intensif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu dan edukasi tentang pentingnya pencegahan stunting.
- Pengembangan Infrastruktur Dasar: Kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperbaiki akses jalan dan infrastruktur dasar lainnya di daerah yang sulit dijangkau, guna mempermudah warga mengakses layanan posyandu dan program kesehatan lainnya.

BAB III PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Jambi dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting. Kerja sama dan komitmen dari seluruh pihak, baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi, maupun masyarakat, sangat penting dalam mewujudkan Provinsi Jambi yang bebas stunting. Dengan langkah-langkah strategis yang telah direkomendasikan, diharapkan TPPS dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga target penurunan angka stunting dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan sebesar 12% pada tahun 2024.

Demikian laporan hasil monitoring dan evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten/kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa ini dibuat dan besar harapan tim dapat menerima kritikan dan masukan yang membangun baik itu untuk penulisan maupun sebagai bahan perbaikan pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kedepan.

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten/kota

KABUPATEN SAROLANGUN



KABUPATEN MUARO JAMBI



KABUPATEN BATANG HARI



HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024

KOTA JAMBI



KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024

KABUPATEN TEBO



KABUPATEN BUNGO



KABUPATEN MERANGIN



HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024

KABUPATEN KERINCI



KOTA SEI PENUH



HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024

Lampiran 2. Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan

<p>Pemayang dan Ma Bulian</p>	
<p>Sekernan dan Maro Sebo</p>	
<p>Geragai dan Sabak Barat</p>	
<p>Jelutung dan Kota Baru</p>	

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024

<p>Tebo ulu dan Sekcam Rimbo ilir</p>	
<p>Pasar Ma. Bungo dan Rimbo Tengah</p>	
<p>Pasar Ma. Bungo dan Rimbo Tengah</p>	
<p>Air Hangat dan Air Hangat Barat</p>	

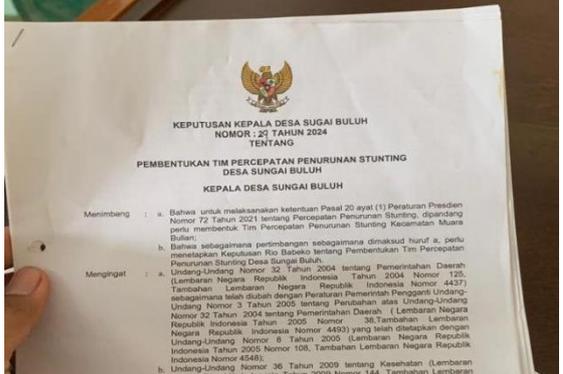
HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024



Lampiran 3. Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa/Kelurahan



HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024

	
<p>Monitoring dan Evaluasi TPPS Desa/Kelurahan</p>	<p>Monitoring dan Evaluasi TPPS Desa/Kelurahan</p>
	
<p>Monitoring dan Evaluasi TPPS Desa/Kelurahan</p>	<p>Monitoring dan Evaluasi TPPS Desa/Kelurahan</p>
	
<p>Monitoring dan Evaluasi TPPS Desa/Kelurahan</p>	<p>Dokumen Pendukung SK TPPS Desa/Kelurahan</p>

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024



Monitoring dan Evaluasi TPPS
Desa/Kelurahan



Monitoring dan Evaluasi TPPS
Desa/Kelurahan

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024

		<p>kegiatan antar dinas serta Pemangku Kepentingan di tingkat Provinsi?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Forum pertemuan apa yang dilaksanakan? 3. Bagaimana tindak lanjut hasil pertemuan-pertemuan tersebut? 4. Apa yang dilakukan untuk mendorong peran Swasta dan Perguruan Tinggi (Pentahelix) dalam Percepatan Penurunan Stunting?
4	Pemantauan, Evaluasi Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kondisi angka stunting? 2. Bagaimana mekanisme penyusunan laporan semesteran TPPS? (mulai dari sumber data, kualitas data, evaluasi data sampai pada tim penyusun laporan)
5	Peran Pemangku Kepentingan	Bagaimana peran para pemangku kepentingan dan TP PKK Provinsi dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting? termasuk peranan satgas
6	Pencapaian Indikator PerPres dan RAN PASTI	<p>Identifikasi indikator mana yang pada masih jauh dari target</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator mana yang pencapaiannya yang paling sulit untuk • Indikator mana di perpres atau RANPASTI yang programnya belum bisa dimplementasikan atau datanya tidak
7	Inovasi	Apakah ada inovasi yang dilakukan TPPS Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PPS?
8	Masalah dan Kendala	
9	Rekomendasi	

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024

		pelaporan khusus terkait PPS?
3	Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi kegiatan BOKB khusus penurunan stunting Tahun 2023? * 7 menu BOKB (BKB Kit, Operasional Pendampingan KRS, Operasional pencatatan hasil dampingan KRS, DAHSAT, Rapat Koordinasi, AKS, Minilokakarya) 2. Bagaimana cara masing-masing bidang (bidang pelayanan, bidang komunikasi perubahan perilaku dan TPK, bidang koordinasi dan konvergensi, bidang data, monev dan knowledge management) melaksanakan tugasnya? 3. Apakah sudah tersedia program kerja per Bidang di TPPS? 4. Bagaimana penerapan pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi? 5. Bagaimana progress pelaksanaan PMT Lokal (DAK Non Fisik)? 6. Apa yang dilakukan untuk mendorong peran Swasta dan media dalam Percepatan Penurunan Stunting?
4	Ketersediaan dan Pemanfaatan Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah tersedia dan terupdate data percepatan penurunan stunting? (e-PPGBM dan Keluarga Berisiko Stunting, ELSIMIL) 2. Bagaimana pemanfaatan data PPS dalam pelaksanaan program dan kegiatan?
5	Pemantauan, Evaluasi Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana angka stunting di lokus? 2. Bagaimana mekanisme penyusunan laporan semesteran TPPS? (mulai dari sumber data, kualitas data, evaluasi data sampai pada tim penyusun laporan) 3. Apakah TPPS Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Desa/Kelurahan? (laporan)
6	Peran Pemangku Kepentingan dan Lintas Sektor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran para pemangku kepentingan dan TP PKK Kabupaten/Kota dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting? termasuk peranan satgas 2. Apakah telah terdapat peran lintas sektor dalam PPS (Perguruan Tinggi, Organisasi, Swasta, dll)

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024

7	Pencapaian Indikator PerPres dan RAN PASTI	Identifikasi indikator mana yang pada masih jauh dari target: <ul style="list-style-type: none">• Indikator mana yang pencapaiannya yang paling sulit.• Indikator mana di perpres atau RANPASTI yang programnya belum bisa diimplementasikan atau datanya tidak tersedia.
8	Inovasi	Apakah ada inovasi yang dilakukan TPPS Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PPS?
9	Masalah dan Kendala	
10	Rekomendasi	

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024

		<p>- output</p> <p>3. Apakah ada partisipasi/keterlibatan dari pihak swasta, perguruan tinggi, media, lembaga masyarakat, individu dalam penurunan stunting?</p> <p>4. Bagaimana mengawasi Kelurahan /Desa?</p>
4	Ketersediaan dan Pemanfaatan Data	<p>1. Apakah tersedia dan terupdate data percepatan penurunan stunting? (e-PPGBM dan Keluarga Berisiko Stunting, ELSIMIL)</p> <p>2. Bagaimana pemanfaatan data PPS dalam pelaksanaan program dan kegiatan?</p>
5	Pemantauan, Evaluasi Pelaporan	<p>1. Apakah tersedia laporan PPS di tingkat kecamatan?</p> <p>2. Bagaimana mekanisme penyusunan laporan semesteran TPPS? (mulai dari sumber data, kualitas data, evaluasi data sampai pada tim penyusun laporan)</p> <p>3. Apakah TPPS Kecamatan melakukan monitoring dan evaluasi di TPPS Desa/Kelurahan? (Program PPS dan penganggaran PPS)</p>
6	Masalah dan Kendala	Apakah ada masalah dan kendala dalam pelaksanaan PPS di Kecamatan? Sebutkan
7	Rekomendas	Apakah ada rekomendasi dalam pelaksanaan PPS di Kecamatan? Sebutkan

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024

		<p>keluarga berisiko Stunting</p> <p>d. Pendampingan Ibu Hamil</p> <p>e. Pendampingan ibu pascapersalinan</p> <p>f. Pendampingan PUS ingin anak ditunda (IAT) atau tidak ingin anak lagi (TIAL)</p> <p>g. Pendampingan keluarga dengan anak usia 0-23 bulan</p> <p>h. Pemantauan berat badan dan panjang/tinggi badan balita 0-59 bulan sesuai standar/usia</p> <p>i. Pemantauan berat badan dan panjang/tinggi badan balita 0-59 bulan sesuai standar/usia</p> <p>j. Pemantauan perkembangan balita 0-59 bulan sesuai standar/usia</p> <p>k. Fasilitasi keluarga prasejahtera berisiko Stunting penerima bantuan sosial</p> <p>l. Fasilitasi keluarga prasejahtera berisiko Stunting penerima bantuan social</p> <p>m. Fasilitasi terhadap akses air minum layak bagi keluarga berisiko Stunting</p> <p>n. Fasilitasi kepemilikan rumah layak huni bagi keluarga berisiko Stunting</p> <p>o. Fasilitasi jamban sehat bagi keluarga berisiko Stunting</p> <p>p. Fasilitasi jamban sehat bagi keluarga berisiko Stunting</p> <p>q. Dapur Gizi Keluarga di desa prioritas Stunting berbasis pangan lokal</p> <p>r. Pemantauan perkembangan balita 0-23 bulan sesuai standar/usia</p> <p>s. Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis</p> <p>t. Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan gizi kurang</p> <p>u. Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan gizi buruk</p> <p>v. Pendampingan Semua Calon Pengantin Calon Pasangan Usia Subur (PUS)/ Pendampingan Catin 3 (tiga) bulan sebelum menikah</p>
5	Ketersediaan dan Pemanfaatan Data	<p>1. Apakah tersedia dan terupdate data percepatan penurunan stunting? (kasus stunting, Keluarga Berisiko Stunting, ELSIMIL)</p> <p>2. Bagaimana pemanfaatan data PPS dalam pelaksanaan program dan kegiatan?</p>
5	Pemantauan, Evaluasi	<p>1. Apakah tersedia laporan PPS di tingkat</p>

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TPPS PROVINSI JAMBI SEMESTER 1 TAHUN 2024

	Pelaporan	Desa/Kelurahan? 2. Bagaimana mekanisme penyusunan laporan semesteran TPPS? (mulai dari sumber data, kualitas data, evaluasi data sampai pada tim penyusun laporan) 3. Apakah TPPS Desa/Kelurahan melakukan monitoring dan evaluasi pada TPK dalam pendampingan?
7	Masalah dan Kendala	Apakah ada masalah dan kendala dalam pelaksanaan PPS di Desa/Kelurahan? Sebutkan
7	Harapan	Apakah ada rekomendasi dalam pelaksanaan PPS di Desa/Kelurahan? Sebutkan